



Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan

INFO PENULIS

Briyan Pratama Saputra
Universitas Muhammadiyah Lampung
Indonesia
anichasaleh@gmail.com

Eny Inti Suryani
Universitas Muhammadiyah Lampung
Indonesia
EnyIntiSuryani@gmail.com

Yonawati
Universitas Muhammadiyah Lampung
Indonesia
Yonawati@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Saputra, B. P., Suryan, E. I & Yonawati. (2025). Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1467-1476.

Abstrak

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Latar belakang pelaksanaan program ini adalah masih tingginya angka anak putus sekolah dan kesenjangan akses pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah tersebut, dengan fokus pada enam indikator utama yaitu: sosialisasi, prosedur pelaksanaan, tahap pengajuan, penetapan penerima, pencairan dana, dan monitoring evaluasi, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, analisis dokumen, serta wawancara dengan berbagai informan yang relevan, termasuk kepala sekolah, wali kelas, dan siswa penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIP secara signifikan membantu mengurangi hambatan ekonomi dan memperluas kesempatan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, masih ditemukan beberapa tantangan seperti ketidakakuratan data sasaran dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penggunaan dana. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program guna mencapai tujuan pemerataan pendidikan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Akses Pendidikan, Pemerataan Pendidikan, Bantuan Sosial Pendidikan.

Abstract

The Smart Indonesia Program (PIP) is one of the government's strategic programs that aims to improve access to education for school-age children from underprivileged families. The background to the implementation of this program is the still high number of school dropouts and the gap in access to education influenced by economic factors. This study aims to describe and analyze the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in the school, focusing on six main indicators, namely: socialization, implementation procedures, submission stages, determination of recipients, disbursement of funds, and monitoring and evaluation, West Tulang Bawang Regency. The methods used include direct observation, document analysis, and interviews with various relevant informants, including school principals, homeroom teachers, and beneficiary students. The results of the study indicate that the KIP program significantly helps reduce economic barriers and expand educational opportunities for students from underprivileged families. However, several challenges were still found, such as inaccurate target data and lack of public understanding of the mechanism for using funds. These findings provide an important picture for policy makers to improve program implementation in order to achieve the goal of equalizing education and supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Policy Implementation, Access to Education, Equity in Education, Social Assistance for Education.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sebuah bangsa yang maju dan berdaya saing melalui pendidikan telah dijamin sebagai hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Akses yang setara terhadap pendidikan sangat esensial dalam membentuk generasi masa depan yang berwawasan, kompetitif, dan bermoral. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah upaya strategis yang diinisiasi oleh pemerintah untuk menjamin bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat mengakses pendidikan yang bermutu. (Aulia et al., 2024 : 307).

Jumlah total kasus yang tercatat adalah 119 pada tahun 2021 dengan distribusi terbesar pada Tahap 1 dan Tahap 54 yang masing-masing mencapai 32 kasus. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 75 kasus, dengan distribusi yang lebih merata tanpa dominasi tahap tertentu. Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus meningkat drastis hingga 225, terutama disebabkan oleh lonjakan pada Tahap 43 dan Tahap 180 yang masing-masing mencapai 91 kasus. Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya tren fluktuatif, dengan penurunan pada tahun 2022 dan lonjakan tinggi pada tahun 2023, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu diteliti lebih lanjut.

Salah satu program yang diinisiasi pemerintah untuk mendukung siswa dalam sektor pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). PIP merupakan pemberian bantuan finansial kepada pelajar berusia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu dan menjadi bagian dari pengembangan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pelaksanaan PIP ini dilakukan sebagai tindak lanjut Kebijakan Presiden sekitar tahun 2014, dengan tujuan untuk menciptakan dan mendukung keluarga yang lebih produktif. Aulia et (Agusman, 2019 : 105) Salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan adalah melalui implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi mahasiswa kurang mampu, dengan harapan dapat mengurangi angka putus kuliah di kalangan mahasiswa. dalam pedoman penyelenggaraan Kartu Negara Republik Indonesia yang baik dijelaskan beserta pengertiannya, dasar hukum, tujuan, sasaran, jumlah dana, sumber dana, penggunaan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi (Karunia, 2016 : 30). KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi namun berasal dari keluarga yang mampu secara finansial tidak diperkenankan untuk mendaftar program ini (Kebudayaan, 2021 : 2).

Wilayah pedesaan seperti Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, akses pendidikan menjadi tantangan tersendiri. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan menengah atas di wilayah ini masih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Selain

faktor ekonomi, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi penghambat utama (BPS Tulang Bawang Barat, n.d.2023). Program KIP diharapkan mampu menjadi alternatif untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di daerah ini.

Penelitian terkait implementasi KIP di sekolah ini sangat penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan efektivitas program dalam meningkatkan akses pendidikan. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam mengevaluasi dan meningkatkan program di masa depan. (Kemdikbudristek, 2022).

Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada tujuan keempat yang bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi semua kalangan. Pendidikan yang merata diyakini dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kemampuan program ini untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat dan efektif. Dalam praktiknya, perbedaan kondisi geografis antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan besar. Di wilayah pedesaan, seperti di Kecamatan Tumijajar, distribusi bantuan sering kali menghadapi hambatan berupa jarak yang jauh, akses transportasi yang terbatas, serta infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, minimnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, seperti petugas pendataan dan pengelola program, turut memperlambat proses implementasi KIP. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi pelaksanaan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi distribusi bantuan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penerima manfaat juga perlu dioptimalkan. Seiring dengan perkembangan era digital, implementasi KIP seharusnya memanfaatkan sistem yang lebih modern dan akurat, seperti penggunaan big data dan aplikasi berbasis daring. Namun, banyak daerah yang masih bergantung pada metode manual dalam pendataan dan penyaluran bantuan, sehingga rawan terjadi kesalahan data penerima. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknologi dan pelatihan bagi tenaga pengelola di tingkat daerah menjadi prioritas agar program ini dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Dengan mempelajari implementasi KIP di SMA Negeri 1 Tumijajar, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan program di lapangan. Berdasarkan dari hasil pra penelitian maka peneliti berminat untuk meneliti penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di SMAN 1 TUMIJAJAR.

B. Metodologi

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan biasanya melibatkan analisis mendalam. pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Sugiyono, 2020 : 33) untuk menggali secara mendalam tentang implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan kepala sekolah, operator Dapodik, serta siswa penerima manfaat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami proses, kendala, dan efektivitas pelaksanaan program, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam meningkatkan akses Pendidikan. Ada 3 pertanyaan dasar yang menentukan tipe penelitian secara empiris, yaitu (1) apa, (2) bagaimana, dan (3) mengapa. (Asiva Noor Rachmayani, 2015 : 18)

C. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi Kebijakan

1) Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan merupakan aspek krusial dalam keberhasilan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat kurang mampu. Di SMA Negeri 1 Tumijajar, kebijakan KIP dinilai tepat sasaran karena menyentuh langsung siswa dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan bantuan finansial untuk tetap bersekolah. Penetapan sasaran dilakukan berdasarkan data resmi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta melalui

koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya. Dengan pendekatan ini, program KIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga reflektif terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang mana sejalan dengan pandangan bahwa ketepatan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan perancang kebijakan dalam memahami masalah publik secara menyeluruh.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara umum sudah cukup tepat sasaran dan mampu membantu siswa dari keluarga tidak mampu dalam mempertahankan keberlangsungan pendidikan mereka. Kepala sekolah menyatakan bahwa program ini telah menjangkau siswa-siswa yang benar-benar membutuhkan, dengan mekanisme seleksi berdasarkan data resmi seperti DTKS. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterlambatan pembaruan data ekonomi keluarga dan kurangnya pemahaman teknis di kalangan orang tua maupun siswa mengenai prosedur dan penggunaan dana KIP. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada penetapan sasaran, tetapi juga pada efektivitas implementasi di lapangan, termasuk komunikasi antar pemangku kepentingan.

Ketepatan kebijakan dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar terlihat dari kesesuaian program dengan kondisi sosial ekonomi siswa serta kebutuhan riil dunia pendidikan di daerah tersebut. Kebijakan PIP dirancang untuk memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan biaya. Di tingkat sekolah, pelaksanaan kebijakan ini merujuk pada petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disesuaikan dengan sistem pendataan melalui Dapodik dan DTKS. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dirancang berdasarkan data faktual dan dapat diimplementasikan secara nasional namun tetap mempertimbangkan konteks lokal Kemdikbud, (2020:8)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara umum kebijakan PIP dinilai tepat oleh berbagai pihak karena berhasil menyalurkan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun demikian, akurasi pendataan masih menjadi faktor penentu utama ketepatan kebijakan tersebut. Jika data siswa kurang mampu tidak diperbarui secara berkala, maka kebijakan yang sebenarnya baik dan adil menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dari hasil observasi di sekolah, tampak bahwa pelaksanaan kebijakan PIP telah mengikuti pedoman teknis dan alur prosedur yang berlaku. Sekolah juga telah memasang pengumuman penerima PIP di papan informasi dan menyosialisasikan tujuan program kepada siswa dan orang tua. Meskipun demikian, pihak sekolah juga menyadari masih adanya siswa yang layak tetapi belum terakomodasi karena keterbatasan pada pembaruan data. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem informasi dan koordinasi lintas lembaga.

2) Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar mencerminkan sejauh mana kebijakan ini dijalankan secara sistematis, terjadwal, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaan dimulai dari pendataan siswa calon penerima, verifikasi data, hingga proses pencairan dana yang diawasi oleh pihak sekolah dan dinas terkait. Meskipun secara umum berjalan lancar, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan kesalahan teknis dalam penginputan data. Untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah terus meningkatkan koordinasi antar tim pelaksana serta memberikan pendampingan kepada siswa dan orang tua dalam proses administrasi. Pelaksanaan yang tepat memerlukan manajemen pelaksana yang efektif dan komunikasi yang terbuka antara stakeholder pendidikan.

Ketepatan pelaksanaan program KIP sangat bergantung pada keakuratan data yang dimasukkan ke dalam sistem Dapodik dan kecepatan proses verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan. Kepala sekolah juga menekankan pentingnya peran aktif sekolah dalam memberikan bimbingan kepada siswa dan orang tua, mengingat banyak dari mereka yang kurang memahami prosedur administratif seperti pembukaan rekening atau pencairan dana. Oleh karena itu, sekolah secara rutin mengadakan pertemuan dan pendampingan teknis untuk mencegah kesalahan dalam proses administrasi. Upaya ini dinilai cukup efektif dalam meminimalkan hambatan pelaksanaan, meskipun kendala eksternal seperti sistem pusat yang lambat masih menjadi tantangan tersendiri.

Ketepatan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar menunjukkan bahwa prosedur teknis telah dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan. Proses dimulai dari pendataan, verifikasi, pengajuan, hingga pencairan dana, dengan pihak sekolah berperan aktif dalam memastikan kelengkapan dokumen

dan validitas data siswa. Pendampingan kepada siswa dan orang tua juga dilakukan untuk memperlancar setiap tahapan proses.

3) Ketepatan Sasaran atau target

Ketepatan sasaran atau target dalam implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat menentukan efektivitas program dalam menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan. Di SMA Negeri 1 Tumijajar, mekanisme penentuan penerima dilakukan melalui seleksi berdasarkan kriteria ekonomi dan sosial yang merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta validasi dari pihak sekolah dan wali kelas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kasus di mana siswa yang seharusnya layak justru tidak menerima bantuan karena keterlambatan pembaruan data atau kesalahan administratif. Oleh karena itu, ketepatan sasaran membutuhkan sistem verifikasi dan evaluasi yang berkelanjutan agar program benar-benar menysasar siswa yang berhak. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa penentuan target yang akurat memerlukan basis data yang valid dan proses verifikasi yang transparan

Program KIP memiliki acuan utama berupa DTKS, masih terdapat celah di mana siswa dari keluarga tidak mampu tidak tercantum dalam data tersebut. Untuk mengatasi hal ini, sekolah mengambil inisiatif dengan mengusulkan siswa melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diverifikasi secara internal dan diajukan ke dinas pendidikan. Kepala sekolah mengakui bahwa mekanisme ini cukup membantu menjangkau siswa yang terlewat oleh sistem, tetapi menekankan perlunya pembaruan data secara rutin serta keterlibatan instansi sosial dalam verifikasi lapangan. Dengan demikian, ketepatan sasaran dapat lebih dijamin melalui kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penelitian oleh Zamjani, (2019) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan PIP, terdapat sejumlah penerima yang tidak tepat sasaran. Literasi administrasi orang tua menjadi salah satu masalah lambatnya pencairan dana, dan pemanfaatan dana umumnya sudah sesuai aturan meskipun ada beberapa kasus yang berlawanan.

Ketepatan sasaran dalam Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan adalah siswa dari keluarga kurang mampu, yang teridentifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dapodik. Namun, masih terdapat kasus di mana siswa yang memenuhi kriteria tidak menerima bantuan karena belum tercatat dalam data nasional atau terjadi kekeliruan dalam pendataan awal.

Observasi menunjukkan bahwa daftar penerima ditempel di papan pengumuman dan dijelaskan dalam forum pertemuan. Sekolah telah berupaya menyalurkan bantuan kepada yang tepat, namun batasan sistem membuat ketepatan sasaran tidak sepenuhnya ideal. Hal ini menegaskan perlunya pembaruan data yang lebih rutin dan akurat di tingkat sekolah. Meskipun terdapat upaya dari pihak sekolah untuk memastikan ketepatan sasaran, masih diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan dan verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan.

4) Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dalam implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar turut memengaruhi keberhasilan program secara menyeluruh. Lingkungan sosial yang mendukung, seperti partisipasi aktif orang tua, wali kelas, dan komite sekolah, berperan penting dalam memfasilitasi proses pelaksanaan program. Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti akses internet dan perangkat komputer di sekolah juga memperlancar proses administrasi dan pencairan dana KIP. Namun, masih terdapat tantangan dalam lingkungan fisik, terutama bagi siswa yang tinggal di wilayah terpencil dengan akses komunikasi yang terbatas. Oleh karena itu, sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas program. Lingkungan yang kondusif terbukti menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan publik, terutama dalam konteks pendidikan

Ketepatan lingkungan dalam implementasi program KIP sangat dipengaruhi oleh kesiapan sosial dan teknis di sekitar sekolah. Kepala sekolah menekankan bahwa meskipun dukungan dari guru dan komite sekolah cukup baik, masih ada hambatan dari sisi orang tua yang belum terbiasa dengan teknologi, khususnya dalam proses aktivasi rekening dan pelaporan penggunaan dana. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam tahapan administratif, yang berpengaruh pada efektivitas program. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan singkat atau bimbingan teknis untuk orang tua penerima bantuan, serta peningkatan fasilitas digital di sekolah agar pengelolaan program KIP dapat berjalan lebih lancar.

Penelitian oleh Karningsih, (2021) menunjukkan bahwa implementasi PIP di SMP Negeri 1 Japah Kabupaten Blora belum optimal dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan siswa.

Komunikasi program PIP dilakukan melalui sosialisasi pemanfaatan bantuan dana PIP, namun tidak ada pengawasan dalam pemanfaatan dana tersebut. Struktur birokrasi sederhana oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa, dan sumber daya manusia sudah melaksanakan tanggung jawabnya, meskipun terdapat masalah dalam pendistribusian dana karena kurang tepat waktu.

Ketepatan lingkungan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar menunjukkan bahwa lingkungan sekolah dan sosial mendukung keberhasilan program. Kerja sama antara guru, wali kelas, kepala sekolah, dan komite sekolah terjalin dengan baik, serta partisipasi orang tua dalam menyiapkan dokumen dan mendampingi ke bank menunjukkan dukungan yang positif.

Observasi mendukung hal tersebut, di mana komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua berlangsung cukup baik. Informasi disampaikan secara terbuka, dan siswa terlihat aktif dalam proses pengumpulan dokumen serta pelaporan penggunaan dana. Ini menunjukkan bahwa lingkungan internal dan eksternal sekolah cukup kondusif bagi keberhasilan program. Lingkungan yang mendukung di SMA Negeri 1 Tumijajar berkontribusi positif terhadap pelaksanaan PIP, meskipun masih terdapat tantangan dalam pengawasan pemanfaatan dana yang perlu diperhatikan lebih lanjut

5) Ketepatan Proses

Ketepatan proses dalam implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar mencerminkan efisiensi dan transparansi dalam tahapan administrasi mulai dari pengumpulan data siswa, pengusulan nama penerima, verifikasi, hingga pencairan dana. Pihak sekolah secara rutin mengikuti jadwal pelaporan dan penyaluran bantuan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap tahapan dicatat dan dilaporkan secara sistematis untuk menghindari kesalahan data dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan. Namun, dalam beberapa kasus, proses pencairan mengalami keterlambatan akibat faktor teknis, seperti sistem daring yang bermasalah atau kekurangan dokumen pelengkap. Untuk itu, sekolah terus melakukan evaluasi dan pelatihan administrasi bagi petugas yang menangani program KIP agar proses berjalan semakin efektif. Ketepatan proses yang baik sangat bergantung pada koordinasi antarpihak dan pelaksanaan yang disiplin sesuai prosedur.

Ketepatan proses dalam pelaksanaan program KIP sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial sekolah dalam mengatur alur kerja administrasi. Kepala sekolah menyampaikan bahwa prosedur yang dijalankan selalu merujuk pada petunjuk teknis dari kementerian, namun kendala muncul karena beban kerja operator sekolah yang tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penginputan atau pelaporan data. Sebagai solusi, sekolah secara berkala mengadakan sosialisasi kepada orang tua agar memahami alur dan prosedur yang berlaku, serta membentuk tim kecil untuk membantu proses administrasi. Transparansi juga dijaga melalui pelaporan rutin dalam rapat komite sekolah agar setiap proses dapat dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.

Penelitian oleh Sumarni, (2022) dalam Jurnal Administrasi Pendidikan menunjukkan bahwa penerapan proses yang tepat secara signifikan mengurangi risiko kesalahan data dan mempercepat pencairan bantuan. Dalam studi tersebut, sekolah yang mengikuti SOP dari kementerian secara ketat, terbukti berhasil menyalurkan dana PIP lebih cepat dan minim kendala teknis, seperti penolakan pencairan akibat data ganda atau kesalahan identitas. Ini menunjukkan bahwa ketepatan proses bukan hanya soal urutan kerja, tetapi juga menyangkut kualitas manajemen program yang berdampak langsung pada keberhasilan distribusi bantuan pendidikan.

Ketepatan proses dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sangat berkaitan dengan kesesuaian prosedur di lapangan dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap tahap dari pengumpulan data, pengajuan, verifikasi, penetapan, hingga pencairan dana harus dilakukan secara sistematis dan mengikuti alur yang telah ditentukan. Ketepatan ini penting untuk menjamin efisiensi, menghindari keterlambatan, dan memastikan tidak ada siswa yang berhak namun terlewat dari daftar penerima. Proses yang tepat juga memberikan kepastian hukum dan administratif bagi pihak sekolah dan penerima manfaat.

Ketepatan proses akan semakin kuat jika didukung oleh pembaruan sistem digital yang real-time serta pelatihan berkala bagi operator dan guru terkait prosedur administrasi PIP. Dengan demikian, kepercayaan terhadap program akan semakin meningkat, dan bantuan pendidikan akan benar-benar diterima secara efektif oleh siswa yang membutuhkan.

b. Meningkatkan Akses Pendidikan

1) Sosialisasi PIP kepada orangtua

Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) kepada orang tua merupakan tahap awal yang sangat penting dalam memastikan program berjalan secara partisipatif dan tepat sasaran. Melalui sosialisasi ini, orang tua diberikan pemahaman tentang tujuan program, kriteria penerima, serta manfaat dan tanggung jawab yang menyertai bantuan tersebut. Biasanya sosialisasi dilakukan oleh pihak sekolah melalui pertemuan wali murid, media cetak, atau media sosial resmi sekolah, sehingga orang tua mendapatkan informasi yang menyeluruh dan tidak keliru dalam memahami prosedur dan hak yang dimiliki oleh anak mereka sebagai penerima Kemendikbud, (2020:12).

Keterlibatan aktif orang tua, diharapkan proses pelaksanaan PIP menjadi lebih transparan dan efisien. Ketika orang tua memahami alur pengajuan, pencairan, dan pelaporan dana, mereka akan lebih proaktif dalam melengkapi dokumen dan mendampingi anak-anak mereka selama proses berlangsung. Sosialisasi juga menjadi momen untuk membangun komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua, sehingga apabila ada kendala teknis, pihak sekolah dapat segera menindaklanjutinya dengan solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) telah dilakukan oleh pihak sekolah dengan cukup baik, terutama melalui pertemuan wali murid dan media komunikasi seperti WhatsApp. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dalam pemahaman teknis di awal, terutama terkait dokumen dan alur pengajuan. Namun, berkat pendampingan dari wali kelas dan komunikasi yang intensif, orang tua dan siswa secara bertahap mampu memahami proses dan persyaratan program. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan guru sebagai penghubung informasi sangat krusial dalam memastikan efektivitas sosialisasi, dan peran siswa dalam menyampaikan informasi ke orang tua juga tidak kalah penting dalam membangun pemahaman bersama.

Hasil wawancara dengan wali kelas menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat orang tua yang bingung, sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut. Orang tua mengakui bahwa awalnya kurang paham, namun setelah penjelasan dari sekolah, mulai mengerti prosesnya. Siswa juga berperan dalam menyampaikan informasi kepada orang tua, menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah.

Berdasarkan Observasi di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara langsung lebih efektif dibandingkan hanya melalui pesan tertulis. Interaksi tatap muka memungkinkan orang tua untuk bertanya langsung dan mendapatkan klarifikasi, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang program PIP.

2) Prosedur pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan PIP mencakup tahapan yang sistematis mulai dari pendataan calon penerima, verifikasi, penetapan, hingga pencairan dana. Sekolah berperan sebagai penghubung antara siswa dan Kementerian Pendidikan dengan cara menginput data siswa ke dalam sistem Dapodik. Proses ini dilakukan berdasarkan ketentuan teknis dari kementerian agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Penelitian oleh Suryani, (2022) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan PIP sangat bergantung pada ketepatan data dan koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan Kementerian.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari pendataan awal hingga pengajuan dokumen ke sistem Dapodik. Kendala yang umum terjadi adalah ketidaksesuaian data atau kelengkapan dokumen, namun hal ini dapat diatasi melalui pendampingan aktif dari pihak sekolah. Orang tua dan siswa mengakui bahwa meskipun prosesnya cukup panjang dan membutuhkan pemahaman yang baik terhadap jadwal dan alur pengumpulan dokumen, peran guru dan wali kelas sangat membantu dalam menjelaskan serta memandu mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua agar pelaksanaan program berjalan dengan efektif dan tepat waktu.

Prosedur pelaksanaan PIP mencakup pendataan calon penerima, verifikasi data, penetapan, hingga pencairan dana. Sekolah berperan sebagai penghubung antara siswa dan Kementerian Pendidikan dengan menginput data ke dalam sistem Dapodik. Proses ini harus mematuhi ketentuan teknis dari kementerian agar bantuan tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif sekolah dalam mendampingi orang tua dan siswa sangat membantu kelancaran proses pelaksanaan PIP. Sekolah yang proaktif dalam memberikan

informasi dan bantuan administratif cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan program.

3) Tahap Pengajuan

Tahap pengajuan merupakan proses awal administratif yang dilakukan oleh sekolah untuk mengusulkan nama-nama siswa penerima bantuan. Pengajuan dapat dilakukan berdasarkan data otomatis dari sistem Dapodik, namun sekolah juga bisa mengajukan siswa melalui jalur aspiratif atau usulan langsung jika ditemukan siswa yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata dalam DTKS. Proses ini dilakukan secara daring melalui laman resmi PIP atau aplikasi pendukung lainnya. Menurut Wulandari, (2021). keakuratan dan kelengkapan dokumen sangat penting dalam tahap ini, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan siswa gagal mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Tumijajar dilaksanakan secara tertib dengan bimbingan intensif dari pihak sekolah. Sekolah berperan aktif dalam memfasilitasi proses pengumpulan dokumen dan memastikan semua persyaratan administratif terpenuhi agar pengajuan tidak ditolak. Meskipun beberapa orang tua mengalami kesulitan dalam menyiapkan dokumen seperti SKTM, pihak sekolah membantu hingga ke tingkat kelurahan. Pendampingan guru sangat membantu siswa dan orang tua, terutama dalam memastikan kelengkapan data, sehingga proses pengajuan dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti.

Tahap pengajuan merupakan proses awal administratif yang dilakukan oleh sekolah untuk mengusulkan nama-nama siswa penerima bantuan. Pengajuan dapat dilakukan berdasarkan data otomatis dari sistem Dapodik atau melalui jalur aspiratif jika ditemukan siswa yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata dalam DTKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara sekolah, orang tua, dan siswa sangat penting dalam tahap pengajuan. Sekolah yang aktif memberikan pendampingan dan informasi cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam pengajuan PIP.

4) Penetapan penerima

Penetapan penerima PIP dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data dari sistem Dapodik dan DTKS yang telah diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, kementerian akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penerima PIP yang berisi daftar nama siswa yang telah ditetapkan. SK ini menjadi acuan resmi bagi sekolah untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pencairan dana. Hidayat, (2022) menyatakan bahwa validitas data menjadi kunci utama dalam proses penetapan penerima, agar bantuan yang diberikan benar-benar menysasar siswa yang berhak secara objektif dan adil.

Hasil wawancara dengan wali kelas, orang tua, dan siswa, dapat disimpulkan bahwa penetapan penerima PIP masih sepenuhnya bergantung pada sistem pusat yang mengacu pada data dari Dapodik dan DTKS. Meskipun sekolah telah melakukan pengajuan dan verifikasi internal, masih terdapat kasus di mana siswa yang dianggap layak tidak terakomodasi karena belum masuk dalam sistem. Wali kelas berperan aktif dalam menindaklanjuti data yang belum masuk melalui operator sekolah. Sementara itu, orang tua dan siswa umumnya menerima keputusan dengan pemahaman bahwa proses penetapan tidak sepenuhnya berada di tangan sekolah. Kepercayaan terhadap sistem menjadi hal penting, meskipun tetap diperlukan perbaikan dalam keakuratan dan pembaruan data agar lebih adil dan inklusif.

Penetapan penerima PIP dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data dari sistem Dapodik dan DTKS yang telah diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, kementerian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penerima PIP yang menjadi acuan resmi bagi sekolah untuk melanjutkan ke tahap pencairan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam proses penetapan sangat penting untuk membangun kepercayaan orang tua dan siswa terhadap program PIP. Sekolah yang memberikan penjelasan terbuka mengenai proses penetapan cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat.

5) Tahap Pencairan

Tahap pencairan merupakan proses akhir dari pelaksanaan PIP, yaitu penyaluran dana langsung ke rekening siswa penerima. Dana PIP dikirim melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti BRI atau BNI, sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Pihak sekolah berperan dalam mendampingi siswa untuk membuka rekening baru (jika belum memiliki), serta menyampaikan informasi jadwal pencairan dan tata cara pengambilan dana.

Menurut penelitian Lestari, (2021:68), pencairan dana PIP seringkali terkendala oleh masalah administratif seperti nama tidak sesuai pada rekening, NIK tidak valid, atau siswa belum memiliki rekening bank. Penanganan hambatan ini membutuhkan kerja sama antara

sekolah, pihak bank, dan orang tua siswa agar proses pencairan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Lihat jurnal di sini.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap pencairan dana PIP meskipun bersifat teknis, tetap memerlukan pendampingan intensif dari pihak sekolah agar berjalan lancar. Wali kelas memiliki peran penting dalam menyosialisasikan informasi pencairan dan membantu proses aktivasi rekening siswa. Sementara itu, orang tua dan siswa mengakui adanya beberapa hambatan seperti antrean panjang di bank atau kesulitan memahami prosedur teknis, terutama saat aktivasi ATM dan pencetakan buku tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa pencairan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut koordinasi aktif antara pihak sekolah, bank, dan keluarga siswa.

Observasi di SMA Negeri 1 Tumijajar menunjukkan bahwa proses pencairan berjalan cukup baik, meskipun masih ditemui beberapa kendala administratif. Wali kelas dan operator sekolah berperan aktif membantu siswa dan orang tua mengurus dokumen perbankan, serta memberikan arahan teknis terkait jadwal dan persyaratan pencairan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan administrasi sekolah sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pencairan.

Dari hasil wawancara dengan wali kelas, orang tua, dan siswa, dapat disimpulkan bahwa pencairan dana PIP sangat membantu kebutuhan pendidikan siswa. Namun demikian, beberapa kendala teknis seperti antrian bank dan rekening yang belum aktif perlu mendapat perhatian lebih dari pihak terkait agar pencairan bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

6) Monitoring evaluasi PIP

Monitoring dan evaluasi PIP dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan sasaran, prosedur, dan menghasilkan dampak positif bagi penerima. Kegiatan monitoring biasanya dilakukan oleh sekolah melalui pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan oleh siswa. Selain itu, pihak dinas pendidikan juga secara berkala melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan, termasuk mengevaluasi keluhan atau kendala yang muncul di lapangan Kemdikbud, (2020:30).

Menurut hasil penelitian Sutrisno, (2022:75), evaluasi yang dilakukan oleh sekolah maupun dinas pendidikan dapat memberikan masukan penting terhadap keberhasilan PIP. Temuan dari evaluasi seringkali mencakup ketidaktepatan penggunaan dana oleh siswa atau kurangnya pemahaman siswa dan orang tua terhadap tujuan program. Evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan pembenahan sistem pelaksanaan secara menyeluruh. Lihat jurnal di sini.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses monitoring dan evaluasi PIP di SMA Negeri 1 Tumijajar dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak. Wali kelas aktif mengawasi penggunaan dana oleh siswa melalui pelaporan langsung maupun pengamatan kebutuhan di sekolah. Orang tua merasa dilibatkan melalui tanya jawab informal dan merasa bahwa evaluasi semacam ini mendorong transparansi. Dari sisi siswa, mereka memahami bahwa dana harus digunakan sesuai tujuan pendidikan dan merasa terbantu dengan adanya pengarahan dari guru. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendidik siswa dan orang tua dalam mengelola bantuan secara bertanggung jawab.

Observasi menunjukkan bahwa adanya sistem pelaporan dan pengawasan yang dilakukan secara terbuka membuat pelaksanaan PIP lebih akuntabel. Selain itu, keterlibatan aktif guru dan komite sekolah dalam proses evaluasi menjadikan program ini lebih responsif terhadap kebutuhan nyata siswa di lapangan.

Dari wawancara dengan wali kelas, siswa, dan orang tua, diketahui bahwa pemantauan penggunaan dana dilakukan secara informal maupun formal. Guru-guru memastikan bahwa dana tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai kebutuhan pendidikan. Monitoring dan evaluasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas PIP dan memastikan manfaatnya dirasakan secara optimal oleh siswa penerima.

D. Kesimpulan

1. Kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua siswa, terhadap mekanisme dan tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan. Bantuan yang seharusnya dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan justru digunakan untuk kebutuhan lain di luar konteks pendidikan, yang mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan oleh pihak sekolah maupun pemerintah.

2. Penyaluran dana Program KIP masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran, yang dipengaruhi oleh ketidakakuratan data penerima manfaat dalam sistem Dapodik maupun DTKS. Kondisi ini menimbulkan adanya siswa yang memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, dibutuhkan validasi dan pembaruan data secara berkala agar program ini benar-benar menjangkau siswa yang membutuhkan.

Saran

1. Disarankan kepada pihak sekolah dan instansi terkait untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai mekanisme serta tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada orang tua siswa. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, penyuluhan, maupun media informasi digital agar pemanfaatan dana bantuan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung kebutuhan pendidikan siswa.
2. Pemerintah perlu melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala pada sistem Dapodik dan DTKS, bekerja sama dengan pihak sekolah dan aparat desa setempat, guna memastikan bahwa bantuan PIP disalurkan tepat sasaran. Dengan data yang lebih akurat, program ini akan lebih efektif dalam menjangkau siswa dari keluarga tidak mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.

E. Referensi

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105–113.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aulia, S., et al. (2024). Pendidikan Berkualitas untuk Semua. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 307–315.
- BPS Tulang Bawang Barat. (n.d.). *Data Pendidikan dan Sosial Ekonomi Daerah*.
- Karunia. (2016). Implementasi Kebijakan KIP. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(Juni), 2016.
- Karningsih, S. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Japah Kabupaten Blora. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 15(2), 122–130.
- Kebudayaan, K. Pendidikan. (2021). *Buku Saku KIP Kuliah Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemdikbud. (2020). *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbudristek. (2022). *Buku Saku Rapor Pendidikan Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- Lestari, R. (2021). Analisis Hambatan Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 65–72.
- Sumarni, T. (2022). Efektivitas Penerapan Prosedur Operasional Standar dalam Pelaksanaan PIP. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(3), 201–210.
- Suryani, D. (2022). Faktor Penentu Keberhasilan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 110–118.
- Sutrisno, A. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Sekolah dan Dinas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Evaluasi*, 13(1), 74–82.
- Wulandari, E. (2021). Pentingnya Keakuratan Dokumen dalam Proses Penyaluran Dana PIP. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Pendidikan*, 8(1), 55–62.
- Zamjani, M. (2019). Evaluasi Ketepatan Sasaran Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 4(2), 45–53.